DISKUSI BAWASLU YOGYAKARTA

Dorong TPS Ramah Difabel

YOGYA (KR) - Memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta mendesak realisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah difabel di Pilkada 2024.

"KPU wajib membuat TPS yang aksesibel, Bawaslu sejak awal juga melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh kelompok rentan mendapat hak pilih," tutur Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, Jumat (18/10) di Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta.

Di sela Diskusi Publik: Refleksi Pemilu dan Penguatan Pengawasan Berbasis Pancasila dengan mengundang 18 peserta diskusi dari instansi terkait, mahasiswa, sekolah, media, Andie menegaskan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan para penyandang disabilitas benar-benar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro, mengatakan, data penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih di Pilkada 2024 sudah dikantongi dengan rincian, 999 difabel fisik, 271 difabel intelektual, 396 difabel mental, 528 difabel sensorik wicara, 140 difabel sensorik rungu dan 336 difabel sensorik netra. "Kami berkomitmen mengawal pemenuhan hak, terutama akses informasi pada pemilih difabel, untuk mendapatkan informasi sedini mungkin sampai nanti hari H," katanya.

Diakui, dalam Pileg dan Pilpres silam, pihaknya masih menjumpai TPS di Kota Yogya yang belum sepenuhnya ramah difabel. "Kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terus didorong untuk menghadirkan fasilitas yang memadahi," tandasnya.

Diskusi publik menghadirkan narasumber Retno Agustin SSos MHum MDev STU (Inklusivitas Pemilu untuk Kelompok Rentan), Dr Suryawan Raharjo SH LLM (Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum dan Moral) dan Juang Gagah Mardhika SIP MSos (Pengawasan Pemilu yang Berlandaskan Pancasila: Tantangan dan Solusi). **(Vin)-f**

DI PADUKUHAN MALANGAN, SANDEN, BANTUL

Pengembangan Strategi Bisnis Berkelanjutan

BANTUL (KR) - Tiga dosen dari dua perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan program Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) di Padukuhan Malangan, Srigading, Sanden, Bantul pada 14 September 2024.

KR-Istimewa

Narasumber menyampaikan paparan dalam kegiatan PKM di Padukuhan Malangan.

Mengangkat tema 'Pengembangan Strategi Bisnis Berkelanjutan dan Berfokus pada Kesejahteraan Masyarakat'. Program ini merupakan kolaborasi antara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Universitas PGRI Yogyakarta, dunia industri, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) 'Rukun Sari'. Tim pelaksana terdiri dari Feri Febria Laksana MKom, Diah Ayu Puspasari STP MSc, dan Tri Hastono SKom MT melibatkan tiga mahasiswa.

Merupakan bagian dari program PKM yang didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun anggaran 2024.

Feri Febria Laksana menuturkan, tujuan utama kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang cara meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengembangkan teknologi industri yang mendukung proses produksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

"Acara ini juga menekankan pentingnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)," kata Feri, Sabtu (19/10).

Maulana Azkaa Salsabila, sebagai narasumber dari dunia industri berpengalaman dalam ekspor komoditas pertanian bernilai miliaran, memberikan wawasan berharga tentang dunia ekspor, yang diharapkan dapat membantu anggota KWT Rukun Sari dalam meningkatkan level keberdayaan mereka, baik dari aspek produksi maupun sosial.

"Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan para anggota KWT dapat meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan," katanya.

Feri Febria Laksana menambahkan, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para peserta, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"Dengan adanya kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat, diharapkan strategi bisnis berkelanjutan dapat terus dikembangkan dan diterapkan untuk kesejahteraan bersama," pungkasnya. **(Dev)-f**

MUNAJAT UNTUK PALESTINA DAN INDONESIA

Masjid Jogokariyan Sembelih Kerbau

YOGYA (KR)- Munajat untuk Palestina dan Bangsa Indonesia dihelat Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan menyembelih satu ekor kerbau dan satu ekor sapi, Sabtu (19/10) pagi. Daging untuk makan bersama 5.000 jemaah dan warga usai salat subuh, Minggu (20/10). Dimulai pukul 03.00 dengan doa untuk bangsa Indonesia dan Palestina.

"Sesuai amanat pendiri bangsa di Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan. Juga simbolik rasa syukur kita dan doa bahwa bangsa Indonesia akan memasuki tataran baru dengan berakhirnya kekuasaan lama yang ditandai kekecewaan rakyat," ungkap Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustadz Muhammad Jazir Asp.

Ustadz Jazir berharap, rakyat tidak tertipu oleh janji-janji pemimpin dengan pelanggaran konstitusi karena haus kekuasaan. "Agar tidak terulang lagi, bangsa Indonesia kembali ke Pancasila dan Konstitusi UUD 1945," tegasnya.

KR-Juvintarto

Penyembelihan kerbau dan sapi di masjid Jogokariyan.

Demikian pula janji pemimpin dalam pemerintahan baru nanti agar bisa dipenuhi. "Janji makan siang gratis yang bergizi bisa diwujudkan jangan hanya omon-omon saja, seperti misal menghapus subsidi BBM, listrik, pajak naik dan lain-lain yang justru memberatkan masyarakat," ujarnya.

Dalam hal ini, masjid memberi makanan gratis Nasi Kebuli daging sapi/kerbau bisa menjadi contoh upaya masjid untuk mensejahterakan umat seperti selama ini telah dilakukan Masjid Jogokariyan yang telah menjadi rujukan berbagai daerah penjuru Indonesia untuk pengembangan masjid mandiri dan memberi manfaat warga.

"Penyembelihan kerbau/sapi juga menjadi simbolisasi untuk menyembelih watak zionisme, dan genosida di Palestina segera berakhir," tandasnya. **(Vin)-f**

BUTUH KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

YOGYA (KR)- Tantangan dunia pendidikan saat ini cukup kompleks. Butuh perhatian dan penanganan serius. Permasalahan pendidikan sebenarnya ada empat hal utama, yaitu akses, kualitas, relevansi dan juga tata kelola. Semuanya memerlukan pemikiran dan penyelesaian masal secara komprehensif dan kolaborasi lintas sektor.

"Dari sisi kualitas, berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas telah dilakukan. Tetapi untuk kuantitas, atau keterpenuhan jumlah guru di sekolah tidak mudah. Karena pengangkatan guru sebagai ASN dengan jumlah guru ASN yang pensiun tidak seimbang," kata Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY sekaligus Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik), Rudy Prakanto MEng di Yogyakarta, Sabtu (19/10).

Rudy mengatakan, apabila sekolah ada guru purna tugas dan belum ada guru ASN pengganti, otomatis akan mengangkat guru honorer walau secara regulasi tidak diperbolehkan. Semua itu dilakukan demi pelayanan pembelajaran yang berkualitas sekolah mengambil langkah tersebut. Akibatnya, kadang honor untuk guru honorer tersebut, tentu saja sangat bergantung pada kemampuan sekolah, bekerjasama dengan Komite (orang tua siswa). Secara besaran sekolah akan menentukan sesuai dengan jam mengajarnya untuk di satu minggunya.

"Apabila DPR dalam hal ini komisi X memiliki kebijakan adanya standar gaji minimum guru honorer sangat baik. Persoalannya, apabila anggaran dibebankan ke sekolah akan sangat menyulitkan. Padahal kesejahteraan guru honorer memang seharusnya ditingkatkan, akan tetapi lebih dari itu kualitasnya pun harus sesuai standar," paparnya.

Lebih lanjut Rudy menambahkan, masalah kesejahteraan guru honorer butuh perhatian bersama dari semua stakeholders pendidikan dari pemerintah, pemda, LSM, masyarakat duduk bersama, mencari solusi terbaik terkait dengan nasib guru honorer.

Dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K sedikit banyak manjadi solusi terbaik saat ini.

Persoalan dimungkinkan masih ada juga guru honorer yang baru di sekolah, yang di angkat untuk memenuhi jam mengajar para guru yang purna tugas.

"Guru adalah jabatan terhormat yang dampak nyatanya untuk kemajuan bangsa. Tidak seharusnya terabaikan kesejahteraannya," katanya. **(Ria)-f**

'Lembah Kematian', Hasil Riset Tanpa Inovasi-Solusi

BANTUL (KR) - Hasil survei dan penelitian sebatas menjadi karya ilmiah masih kurang memiliki dampak dan manfaat.

"Istilah saya itu hanya seperti lembah kematian, kurang memiliki manfaat serta dampak untuk kehidupan. Karya ilmiah seharusnya memiliki banyak manfaat, memberi solusi, menawarkan inovasi bagi masyarakat," kata Prof Dr Muchlas MT, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) saat membuka KI Award, Paten Expo dan Talkshow Artificial Intelligence (AI) di Bidang Fotografi di Kampus 4 UAD, Ringroad Selatan Bantul, Sabtu (19/10).

Kegiatan untuk menandai Milad ke-13 Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UAD tersebut diberi pengantar Dra Sudarmini MPd (Kepala Sentra HKI UAD), sambutan Prof Anton Yudhana ST MT PhD (Kepala LPPM UAD).

Dalam momentum tersebut dilaunching Katalog Paten #2, Kekayaan IntelektuaI (KI) Award serta talkshow bertema Artificial Intelligence (AI) di Bidang Fotografi dengan narasumber Dr Muhammad Fajar Apriyanto MSn (Bidang Kajian Fotografi Seni Komersial ISI Yogyakarta) dan Dr Norma Sari SH MH (Wakil Rektor Bidang SDM UAD) dengan moderator Arif Ardhy Wibowo MSn.

Kedua narasumber fokus bicara Fenomena Penggunaan dan Dampak Kecerdasan Buatan dalam Industri Fotografi serta Kebijakan Hukum dan Peraturan Penggunaan AI dan Teknologi Digital dalam Fotografi.

Menurut Muchlas, perguruan tinggi sudah sangat sering melakukan riset, penelitian kemudian dituangkan dalam karya ilmiah serta dipublikaskan secara internasional. "Pertanyaan saya, hasil penelitian memberi dampak apa? Inovasi apa? Solusi apa? Itulah yang patut dicamkan lakukanlah penelitian yang berdampak bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Penelitian telah memiliki hak kekayaan intelektual, memiliki hak paten. "Itu memang perlu diurus. Saya justru ingin yang telah memiliki HKI dan hak paten para mahasiswa, dosen diundang dipertemukan dengan investor agar ada tindak lanjut punya dampak nilai ekonomi. Itu pentingnya hilirisasi," ucapnya.

Sebelumnya dalam sambutan Sudarmini dan Anton Yudhana mengatakan, *'ngopyak-opyak'* atau mendorong mahasiswa, dosen melakukan penelitian, kemudian diurus hak kekayaan intelektual dan hak panten membutuhkan waktu panjang dan dorongan besar.

"Sekarang ini Sentra HKI UAD telah memiliki capain global dengan jumlah, paten/paten sederhana 100, desain industri 104, hak cipta 1.448," kata Sudarmini. Ditegaskan Anton Yudhana, jumlah capaian ini bentuk kerja keras dan perjuangan sejak 13 tahun Sentra HKI - UAD berdiri. **(Jay)-f**

KR -Jayadi Kastari

Prof Dr Muchlas MT menyerahkan potongan tumpeng ke Sudarmini MPd disaksikan Prof Anton Yudhana PhD (kiri) dan narasumber talkshow AI.

Skeptisisme dalam Politik

Dr Junaidi, SAg MHum MKom
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas AMIKOM Yogyakarta

LINTAS dunia modern ini manusia harus selalu berani untuk bertanya, menggugat dan meragukan. Keberanian untuk bertanya, menggugat, dan meragukan itu sesungguhnya adalah substansi yang mengisi historisitas manusia. Filsuf Sokrates misalnya, bentuk 'meragukan' itu menjadi sifat keutamaan manusia. Artinya, tanpa berani 'meragukan' wacana perdebatan demokrasi, yang mewarnai kehidupan bersama di era modern ini, tidak akan pernah lahir demokrasi yang sehat. Bagi Sokrates, demokrasi bukan untuk mengantarkan dan memaksakan kebenaran, melainkan untuk menggoyahkan segala keyakinan dan menelanjangi kepalsuan di balik demokrasi.

Metode demokrasi yang dikemukakan Sokrates dipertajam dan disempurnakan oleh filsuf Descartes. Bagi Descartes, manusia akan mencapai puncak kejelasan tentang sesuatu, jika ia mampu untuk meragukannya. Cogito ergo sum, aku ragu, maka aku ada. Aku berasumsi dan mengajukan antithesa bukan untuk sebatas melawan pendapat lawanku, tetapi untuk mempertajam thesa-ku sendiri. Aku mendialektikakan argumen lawanku, untuk menguji kebenaran pendapatku. Itulah dasar bagi toleransi dan perdebatan parlementer di era modern.

Sayang sekali dan sangat disayangkan, nilai-nilai demokrasi sering tidak terjadi dalam wujud sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat. Inti persoalannya adalah kebanyakan politikus dan elite partai bukan untuk memperdebatkan nilai atau hal-hal yang berguna untuk kehidupan bersama, tetapi untuk semata-mata mempertahankan dan memperbesar wilayah kekuasaannya. Dalam kondisi semacam ini sebuah konsep manusia masuk akal yakni manusia yang perlu dan harus mempertanyakan dan meragukan segala kebenaran dan kepercayaan yang selama ini dipegang.

Menurut Collin Crouch, saat ini demokrasi telah mengalami pergeseran dari kalangan masyarakat menengah sebagai power yang memiliki kesadaran dan kepedulian politik dalam membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan dan sederajat (equal) beralih akibat munculnya kelompok baru yang melakukan peran masyarakat. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan baru ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah. Kalangan baru ini adalah kelas menengah ke atas yang mapan secara ekonomi dan cenderung bersifat individualisme sehingga dengan cara memegang kekuasaan politik mereka dapat meningkatkan stabilitas ekonomi pribadinya.

Kalangan baru inilah yang senantiasa menggiring perspektif dan opini masyarakat menjadi wacana politik yang begitu cantik dengan iming-iming pemenuhan kebutuhan publik atau kepentingan umum. Oleh karenanya, menimbulkan kerusakan pada makna demokrasi yaitu penilaian terhadap penerapan sistem demokrasi menuai ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Tidak sedikit kekecewaan masyarakat disebabkan oleh pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dengan dalih kemaslahatan masyarakat. Indonesia masih terkesan menganut sistem demokrasi yang prosedural, belum sampai pada tahap substansi.

Di Indonesia hari ini masih banyak masyarakat yang tertindas oleh keangkuhan elit negara dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Boleh dilihat bagaimana kaum proletar yang menganga di lampu merah, orang tua terbuang di kolong jembatan namun tetap menikmati perihnya mendapatkan sesuap nasi, anak-anak terlantar tanpa pernah menikmati pendidikan, kemiskinan yang merajalela dan masih banyak lagi lainnya. Lebih jelasnya post-demokrasi ini menyasar pada peningkatan skeptisisme (keraguan atau kecurigaan) masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah. Post-demokrasi merupakan fenomena di mana kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam aspek politik serta partai tidak lagi dipercayai sebagai sarana aspirasi dan kepentingan rakyat.

Menurut Prof. Dr. Franz Mangnis Suseono, sekurang-kurangnya ada empat ancaman yang dapat membawa Indonesia pada krisis demokrasi antara lain kegagalan otonomi daerah, kegagalan menciptakan keadilan, money politik dan korupsi, serta maraknya ideologi radikalisme dan fundamentalisme. Contoh sederhana lain dari tantangan internal yang melanda eksistensi demokrasi yakni adanya pemimpin politik yang enggan menerima hasil final dari pemilihan umum, beberapa kasus penyerahan kekuasaan secara damai dan pemimpin yang cenderung otoriter. Hal ini tentu mengarah pada melemahnya ketahanan demokrasi atau kemuduran demokrasi yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun yang bisa saja disebut sebagai "krisis demokrasi".

Sesungguhnya dewasa ini kita berada di dalam situasi krisis epistemologi secara mendasar, sebagai bagian dari krisis posisi filsafat yang juga mempunyai sifat mendasar. Problem skeptisisme adalah problem mengenai eksistensi pengetahuan. Sebagaimana diketahui, masalah tersebut hanya dapat dipecahkan melalui argumentasi atau 'refleksi melalui restorsi, yaitu yang meragukan pengetahuan pada hakikatnya mengakui adanya pengetahuan. Artinya skeptisisme "fundamental mengenai pengetahuan mempunyai sifat self contradictionary, (karena saya mengetahui bahwa saya tidak mengetahui', yang juga berarti (saya mengetahui bahwa saya mengetahui. Semoga!.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park